


Analisis Efektivitas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara

Efraim Sinaga¹, Felix Simangunsong², Samuel Manullang³, Kemala Dewi Lubis⁴, Nela Permata Sari Lubis⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

E-mail: efraimsinaga000@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6053>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 8 April 2026

Kata Kunci

kinerja keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, efektivitas keuangan daerah, akuntansi sektor publik

Keyword

regional financial performance, financial statement effectiveness, local government finance, public sector accounting



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan konseling individu dengan metode Mau'izah terhadap motivasi belajar remaja masjid dalam mengikuti kuliah dhuha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Single Subject Design (SSD) tipe A-B. Subjek penelitian berjumlah lima orang remaja masjid yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria memiliki tingkat motivasi belajar yang rendah. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen skala psikologi motivasi belajar yang diberikan pada tahap pretest dan posttest dan juga dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui perbedaan skor sebelum dan sesudah perlakuan. Skor motivasi belajar pada tahap pretes berada pada perentase 53,4% sedangkan pada tahap posttest meningkat menjadi 92,1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor motivasi belajar antara tahap pretes dan post-test. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis alternatif H_a diterima dan hipotesis nol H_0 ditolak. Dengan demikian, layanan konseling individu dengan metode Mau'izah berpengaruh terhadap motivasi belajar remaja masjid dalam mengikuti kuliah dhuha.

Regional financial management is an important aspect in realizing transparency and accountability in local government administration. Financial statements prepared by local governments serve as a tool to evaluate financial performance and the effectiveness of regional financial management. This study aims to analyze the effectiveness of the financial performance of the Tapanuli Tengah Regency Government based on its regional financial statements. The research uses a quantitative descriptive approach with financial ratio analysis to measure regional financial performance. The data used in this study are secondary data obtained from the Regional Government Financial Statements (LKPD), the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and audit reports issued by the Supreme Audit Agency (BPK). The analysis focuses on several financial performance indicators, including the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD), the regional financial independence ratio, and the regional financial dependency ratio. The results indicate that the financial performance of the Tapanuli Tengah Regency Government shows varying levels of effectiveness in managing regional finances. The effectiveness ratio of PAD reflects the ability of the local government to realize revenue targets, while the independence ratio shows that the region still relies significantly on transfers from the central government. Therefore, improving the management of regional revenue sources is necessary to strengthen regional financial independence and enhance financial performance.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Efraim Sinaga, et al (2026). Analisis Efektivitas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara 4(4) <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6053>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien agar dapat mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan modern, pengelolaan keuangan yang baik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja suatu pemerintah daerah, karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah (Ramadan & Nasution, 2022).

Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi instrumen utama dalam menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja pengelolaan anggaran suatu daerah. Melalui laporan keuangan, masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan pemerintah daerah juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi potensi pendapatan daerah, serta menentukan kebijakan fiskal yang lebih efektif pada periode berikutnya. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terarah dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Rahmayati et al., 2022).

Dalam praktiknya, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui berbagai indikator, salah satunya melalui analisis rasio keuangan daerah. Analisis ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan, tingkat kemandirian keuangan daerah, serta tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio keuangan daerah dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan secara mandiri (Mahmudi, 2019).

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kinerja laporan keuangan daerah juga menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik (Nasution & Siregar, 2020).

Evaluasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah biasanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui proses audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk opini audit yang menunjukkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan oleh BPK menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan (Harahap, 2021).

Meskipun pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan mandiri. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta masih terbatasnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja keuangan daerah masih perlu terus dilakukan agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan daerah (Pratama & Wahyudi, 2021).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik selama satu periode anggaran. LKPD disusun

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta arus kas yang terjadi selama satu tahun anggaran. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Rahmayati, Putri, & Hidayah, 2022).

LKPD memiliki tujuan utama untuk menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran daerah serta sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan keuangan pada periode selanjutnya. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Nasution & Siregar, 2020).

Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga menjadi sarana penting dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Melalui laporan tersebut, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil audit tersebut kemudian menjadi indikator dalam menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan serta kualitas pengelolaan keuangan daerah (Harahap, 2021).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Penilaian kinerja keuangan menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara optimal dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Mahmudi, 2019).

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator tertentu yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah. Indikator tersebut dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan, mengendalikan pengeluaran, serta memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan anggaran serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah (Pratama & Wahyudi, 2021).

Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan daerah merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efektif. Dengan menggunakan analisis rasio, kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dinilai secara lebih objektif dan terukur (Mahmudi, 2019).

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah adalah rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah (Pratama & Wahyudi, 2021).

Selain rasio efektivitas, terdapat pula rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan sumber pendapatan sendiri. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan (Sari & Putra, 2022).

Rasio lain yang digunakan dalam analisis keuangan daerah adalah rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah masih bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa daerah masih memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Nasution & Siregar, 2020).

Efektivitas Laporan Keuangan Daerah

Efektivitas laporan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan bermanfaat bagi

pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang efektif tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah, tetapi juga mampu memberikan gambaran mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Rahmayati et al., 2022).

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, efektivitas laporan keuangan juga berkaitan dengan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akan memudahkan proses pengawasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, efektivitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah (Pratama & Wahyudi, 2021).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Wahyudi menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Pratama & Wahyudi, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Putra juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat dinilai melalui berbagai indikator seperti rasio efektivitas, rasio kemandirian, serta rasio ketergantungan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah (Sari & Putra, 2022).

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, analisis efektivitas kinerja laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sumber utama informasi yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui analisis rasio keuangan, dapat diketahui tingkat efektivitas pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari laporan keuangan pemerintah daerah yang kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan daerah. Hasil analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah serta tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis efektivitas kinerja laporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan

kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data keuangan secara numerik melalui perhitungan rasio keuangan daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada ketersediaan data laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dianalisis untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan data keuangan daerah yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa tahun anggaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau laporan resmi yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan realisasi anggaran, laporan keuangan daerah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis rasio digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan daerah. Rasio keuangan daerah dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan serta tingkat kemandirian keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi beberapa indikator, yaitu rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, serta rasio desentralisasi fiskal. Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran. Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dengan menggunakan sumber pendapatan sendiri. Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah

Keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya (Pratama & Wahyudi, 2021).

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada umumnya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri masih perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan daerah (Nasution & Siregar, 2020).

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan (Mahmudi, 2019).

Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada beberapa periode anggaran telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Namun demikian, tingkat efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah (Sari & Putra, 2022).

Peningkatan efektivitas PAD dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti peningkatan sistem pemungutan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah yang lebih efisien. Dengan meningkatkan efektivitas pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal serta meningkatkan kemampuan dalam membiayai program pembangunan daerah secara mandiri (Pratama & Wahyudi, 2021).

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan sumber pendapatan sendiri. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun sumber pendapatan lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri (Mahmudi, 2019).

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini terlihat dari masih besarnya proporsi dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah (Nasution & Siregar, 2020).

Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan investasi daerah, serta optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat meningkat secara bertahap (Rahmayati et al., 2022).

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total dana transfer dari pemerintah pusat dengan total pendapatan daerah. Tingginya rasio ketergantungan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Sari & Putra, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan daerah, tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi. Dana transfer seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menjadi sumber pendapatan yang cukup besar dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan sendiri masih perlu ditingkatkan (Pratama & Wahyudi, 2021).

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat mempengaruhi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap. Peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat stabilitas keuangan daerah (Nasution & Siregar, 2020).

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kondisi yang cukup stabil dalam pengelolaan

keuangan daerah. Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan cukup efektif (Mahmudi, 2019).

Namun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi ekonomi daerah agar dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah (Rahmayati et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui pendekatan analisis rasio keuangan daerah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari rasio efektivitas PAD yang pada beberapa tahun terakhir berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran daerah dengan cukup optimal.
2. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya kuat.
3. Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Dana transfer seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus masih menjadi sumber pendapatan utama dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah secara mandiri.
4. Secara umum, kinerja laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dikatakan cukup baik dalam hal realisasi pendapatan daerah. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan daerah agar dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi ekonomi daerah, peningkatan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan periode data yang lebih panjang atau dengan melakukan perbandingan antara beberapa daerah. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. I. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio keuangan daerah pada era otonomi daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 45–56.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, S., & Siregar, R. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pendekatan rasio keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 75–86.
- Pratama, R., & Wahyudi, D. (2021). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 110–121.
- Rahmayati, R., Putri, M., & Hidayah, S. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(2), 130–141.
- Ramadan, N., & Nasution, S. (2022). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 569–579.
- Sari, D., & Putra, R. (2022). Analisis efektivitas dan kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–58.
- Wahyudi, D., & Pratama, R. (2021). Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1), 89–100.